SAMBUTAN KETUA UMUM ALIANSI KEBANGSAAN
DALAM
FGD DENGAN TOPIK: "TEKNOLOGI KESEHATAN DAN FARMASI"
Jakarta, 18 September 2020

Yang saya hormati Prof. Arif Satria, Ketua Forum Rektor Indonesia,
Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Ketua Umum AIPI,
Sari W Pramono, Ketua Bidang IX BPP HIPMI,
Para nara sumber: Prof. Herawati Sudoyo Supolo, Prof. Fasli Djalal, Mayjen TNI (Pur) Dr. Daniel Tjen, DR. Dr. I Gusti Nyoman Darmaputra, dan Sdr. Yudi Latif,
Moderator: Mayjen TNI (Pur) I Dewa Putu Rai,
Serta seluruh peserta diskusi yang saya muliakan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkenannya, pada hari ini kita semua diberi kesehatan, untuk mengikuti FGD secara virtual sebagai rangkaian dari "**Diskusi Serial Kebangsaan**" dalam ranah tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera, yang dilaksanakan bersama-sama oleh Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, dan Harian Kompas sejak Maret 2019 yang lalu. Dalam FGD hari ini, kita akan memperdalam seputar isu pengembangan teknologi dalam menumbuhkan kemandirian dan kemakmuran ekonomi secara berkelanjutan, dengan fokus pada sektor kesehatan dan farmasi. Untuk diskusi ranah tata sejahtera (material teknologikal) yang sudah dilaksanakan beberapa kali sebelum ini, kerjasama pelaksanaannya diperluas dengan menggandeng Akademi Ilmu Pengetahun Indonesia (AIPI) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Isu yang akan kita diskusikan kali ini, penting menjadi perhatian kita bersama, karena ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi, yang telah menyebabkan terjadinya transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (*Resource Base Economy*) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan dan informasi (*Knowledge Base Economy*). Kekuatan suatu bangsa diukur dari kemampuan Iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan, dan energi untuk peningkatan daya saing. Karenanya, peningkatan kapasitas Iptek dan produktivitas adalah kunci sukses meraih daya saing berkelanjutan yang sangat menentukan kemandirian ekonomi suatu bangsa.

Mengingat begitu pentingnya peran Iptek bagi kemandirian ekonomi dan kemajuan sebuah bangsa, apalagi Indonesia telah bertekad menjadi negara maju pada tahun 2045, maka mendesak bagi Indonesia untuk meningkatkan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi yang saat ini memang masih jauh ketinggalan.

Rendahnya penguasaan teknologi Indonesia saat ini, dapat kita telusuri dari beberapa indeks yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga internasional. Ukuran yang berkaitan dengan TFP dan *knowledge economy index* misalnya, menunjukkan betapa rendahnya kontribusi nilai tambah iptek dan tingkat inovasi Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan tahun 2016, kontribusi TFP terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya kisaran 1%, bandingkan dengan Korea Selatan 14% dan Taiwan 24%.[1] Ini menandakan rendahnya kemajuan teknologi di Indonesia.

Untuk memotret perkembangan kemajuan teknologi Indonesia, beberapa tahun yang lalu, Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara (LKEN) melakukan suatu penelitian dan kajian terhadap isu tersebut. Hasil kajian ini menemukan keterbelakangan teknologi dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dilihat dari rata-rata kontribusi *total factor productivity* (TFP) yang masih sangat rendah bahkan dalam periode tertentu berada pada posisi negatif.

Dengan kemampuan penguasaan teknologi yang masih rendah, rasanya sulit bagi bangsa Indonesia untuk menumbuhkan kemandirian dan kemakmuran ekonomi secara berkelanjutan. Indonesia harus mengejar ketertinggalan teknologi ini. Tanpa penguasaan teknologi, mustahil Indonesia akan mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam bidang ekonomi. Kesadaran dan *mindse*t seperti inilah yang harus dibangun sehingga kita memiliki "visi Iptek" yang jelas untuk mendorong dan mengikat semua pihak dalam melakukan berbagai terobosan berbasis Iptek.

Dalam mengejar ketertinggalan teknologi, Indonesia dapat mencontoh keberhasilan negara-negara lain. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain, beberapa hal elementer yang harus diperhatikan oleh Indonesia, antara lain adalah (1) pengembangan inovasi teknologi sudah seharusnya diprioritaskan pada sektor unggulan; dan (2) pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, industri/dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam pengembangan inovasi teknologi pada "sektor unggulan", sudah seharusnya Indonesia memberikan prioritas pada pengembangan kekhasan potensi Indonesia yang bisa memberi nilai tambah terhadap keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang kita miliki. Dalam diskusi publik di IPB bulan Februari 2020 yang lalu, kita telah mendiskusikan pengembangan inovasi teknologi dalam sektor pertanian dan pangan. Hari ini, kita akan fokus mendiskusikan pengembangan inovasi teknologi dalam sektor kesehatan dan farmasi.

Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, industri/dunia usaha, dan masyarakat yang sering disebut kolaborasi "*quarto helix*" sangatlah penting, terutama dalam mendorong proses hilirisasi yaitu proses

[1] APO Productivity Book (2018)

mendekatkan hasil riset dan inovasi kepada dunia usaha/industri atau masyarakat untuk penerapan hingga pemasarannya. Sampai saat ini, proses hilirisasi hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh lembaga riset/perguruan tinggi masih menghadapi berbagai masalah, terutama adanya jurang yang sangat lebar antara lembaga riset/perguruan tinggi di satu sisi, dan dunia usaha/industri di sisi lain. Dalam konteks inilah peran intermediasi pemerintah/birokrasi sangat diperlukan.

Dalam kolaborasi kelembagaan ini, dunia usaha/industri berperan sebagai pendorong, pengembang, pengguna, sekaligus memasarkan hasil riset dan inovasi teknologi. Peran strategis inilah yang harus selalu disadari dan diperhatikan oleh dunia usaha kita.Tanpa peran dunia usaha, inovasi teknologi tidak mungkin akan berkembang. Pengusaha sebagai bagian dari masyarakat harus ambil tanggungjawab atas kemajuan teknologi bangsa ini. Oleh karena itu, pengusahanya harus siap, baik dalam jumlah maupun dalam kualitasnya. Teknologi kontruksi kita misalnya, relatif maju dibandingkan teknologi di sektor lainnya, karena jumlah pengusahanya banyak dan siap.

Jumlah pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 3% dari jumlah penduduk. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Dan dari jumlah ini, tidak semua pengusaha yang ada saat ini ikut berperan dalam mengembangkan inovasi teknologi yang sangat diperlukan dalam mendorong kemandirian ekonomi. Inilah tantangan besar dunia usaha kita dewasa ini yang harus dijawab.

Peserta FGD yang saya hormati,

Persoalan besar yang perlu kita sadari dan waspadai bersama dalam membangun teknologi Indonesia adalah ancaman kekuatan global, baik oleh entitas negara (*state actor*) atau non-negara (*non-state actor*) yang memang tidak menghendaki Indonesia menguasai dan maju teknologinya. Jenis dan bentuk ancaman semacam ini, sangat mengemuka dalam era Perang Generasi ke-IV dewasa ini yang lebih mengutamakan penggunaan *soft-power* dalam berbagai sendi kehidupan secara multidimensi dalam menghancurkan sebuah negara sasaran, tidak terkecuali Indonesia.

Sementara itu, di dalam negeri sendiri, kita masih menghadapi praktik mafia pemburu rente (*rent seeking*) dalam bidang perekonomian/perdagangan termasuk dalam sektor kesehatan dan farmasi. Bisa jadi, dengan disadari atau tanpa disadari, para mafia pemburu rente ini digunakan sebagai "*proxy*" oleh kekuatan global seperti saya sampaikan tadi, untuk menghancukan Indonesia atau sekurang-kurangnya tidak ingin perekonomian Indonesia mandiri dan berdaulat.

Bukan rahasia lagi, bahwa industri nasional di sektor kesehatan dan farmasi belum bisa tumbuh maksimal, juga karena masih dikendalikan oleh "mafia" dalam

negeri yang berkolaborasi dengan industri raksasa medis di luar negeri. Industri kesehatan nasional seringkali hanya berfungsi sebagai "penyalur" dari produsen luar negeri untuk alat kesehatan. Demikian juga dengan industri obat nasional yang bahan bakunya banyak dikendalikan oleh praktik mafia ini. Menteri BUMN-pun beberapa waktu yang lalu sudah mensinyalir adanya mafia ini yang membuat Indonesia terus-menerus mengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan.

Ditengarai, praktik ini adalah bagian dari mafia global di bidang medis, dan tidak mustahil bagian dari Perang G-IV. Mafia global ini, dikenal dengan sebutan "*medical-industrial complex*" yang diadopsi dari istilah "*military-industrial complex*". Dominasi mafia medis ini sudah berlangsung cukup lama. Saat inipun, ketika kita menghadapi pandemi Covid-19, praktik mafia itu diduga masih berlangsung dalam pengadaan alkes dan obat-obatan sebagaimana belakangan ini hangat menjadi perbincangan publik.

Berbagai masalah yang kita hadapi dalam upaya meningkatkan penguasaan inovasi teknologi dalam sektor kesehatan dan farmasi seperti yang saya sampaikan tadi, tentu harus menjadi perhatian kita semua secara sungguh-sungguh agar mampu meningkatkan ketahanan kesehatan (*health security*) Indonesia. Walaupun ketahanan kesehatan Indonesia dalam laporan "*The Global Health Security Index*" yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence pada tahun 2019 menempati posisi 30 di dunia, namun dalam berbagai indikator, kesehatan kita masih memprihatinkan. Ketahanan kesehatan Indonesia masih dibawah Thailand, Malaysia, dan Singapura

Peserta Diskusi yang saya hormati,

Mengingat masih banyak persoalan mendasar yang kita hadapi dalam pengembangan inovasi teknologi, saya berharap dalam forum diskusi ini bisa bertukar pikiran dan urun gagasan sebagai masukan bagi upaya kita bersama mengejar ketertinggalan teknologi Indonesia. Mudah-mudahan kita juga dapat menemukan berbagai terobosan berbasis Iptek dalam sektor kesehatan dan farmasi demi meningkatnya ketahanan kesehatan nasional kita.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 18 September 2020

Pontjo Sutowo[2]

[2] Ketua Aliansi Kebangsaan/Ketua Pembina YSNB/Ketua Umum FKPPI